RANCANGAN AKHIR RENJA
2025

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA BEKASI

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi Tahun 2025. Penyusunan Rencana Kerja ini berpedoman pada RKPD Kota Bekasi Tahun 2023 serta Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024-2026. Melalui penyusunan Rencana Kerja ini, diharapkan pencapaian indikator yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai target walaupun terdapat beberapa penyesuaian sebagai akibat dari adanya perubahan regulasi. Kami menyadari bahwa Rencana Kerja ini tentu masih banyak kekurangan dalam penyusunannya, oleh karena itu sumbang saran dari semua pihak sangat kami harapkan untuk penyempurnaan penyusunan Rencana Kerja yang akan datang. Semoga Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 ini dengan segala keterbatasannya dapat bermanfaat khususnya untuk dijadikan pedoman di dalam pelaksanaan perencanaan program dan kegiatan internal dan umumnya bagi Pemerintah Kota Bekasi di dalam melaksanakan pembangunan terutama dalam hal pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan yang lebih baik.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... ii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Landasan Hukum..... 4

1.3 Maksud dan Tujuan..... 7

1.4 Sistematika Penulisan..... 8

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU..... 9

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Disdukcapil Kota Bekasi Tahun 2023..... 9

2.2 Analisis Kinerja Sumber Daya Manusia Kota Bekasi..... 29

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Disdukcapil Kota Bekasi..... 29

2.4 Review Terhadap RKPD..... 32

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DISDUKCAPIL KOTA BEKASI..... 35

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional..... 35

3.2 Program dan Kegiatan..... 37

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DISDUKCAPIL KOTA BEKASI..... 39

BAB V PENUTUP..... 52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi merupakan dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Kerangka regulasi merupakan sekumpulan pengaturan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk peraturan perundangundangan untuk mencapai sasaran hasil pembangunan sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh. Kerangka anggaran merupakan pengadaan barang maupun jasa yang akan didanai APBD untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Kerangka pendanaan merupakan program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi merupakan pedoman pokok pembangunan untuk kurun waktu 1 (Satu) tahun. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah, Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi disusun mengacu kepada berbagai dokumen perencanaan terkait, baik yang dihasilkan oleh komponen vertikal maupun horisontal . Dari komponen vertikal, dapat digunakan sebagai acuan adalah Rencana Kerja Kementerian dan Lembaga. Dari sisi horisontal, Rencana Kerja ini pun mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, RPJMD Kabupaten, RTRW Kabupaten dan dokumen perencanaan lainnya. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi diawali dengan proses penyampaian usulan masing-masing bidang, selanjunya dilakukan penyusunan rancangan awal Rencana Kerja. Setelah melalui berbagai masukan

dilanjutlkan dengan proses penetapan sebagai dokumen Rencana Kerja yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi yang berpedoman pada berbagai peraturan terkait. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi disusun dengan memperhatikan capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi tahun sebelumnya, sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi yang memuat rencana kegiatan pembangunan tahun berikutnya, dilengkapi dengan formulir kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta indikator pembiayaan 5 (lima) tahun ke depan. Berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan,dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Pemerintah Kota Bekasi untuk Periode 2024-2026 telah menetapkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi 2024 – 2026 yang didalamnya memuat 5 (lima) Tujuan yaitu :

1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel
2. Terwujudnya Pembangunan Manusia dan Masyarakat yang Berkualitas secara Berkeadilan
3. Terwujudnya Ketersediaan Infrastruktur Kota dengan Memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan
4. Terwujudnya Kota Bekasi yang Tertib dan Aman
5. Terwujudnynya Ketahanan Struktur Perekonomian Masyarakat Kota.

Mengacu kepada RPD Kota Bekasi 2024 - 2026, tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi termasuk ke dalam Tujuan pertama yaitu “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel”. RPD Pemerintah Kota Bekasi 2024-2026 merupakan landasan Operasional Pembangunan oleh seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bekasi dalam penyusunan Rencana Strategis masa transisi yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah atau Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja – PD) untuk periode1 (satu) tahun.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai salah satu unsur perangkat daerah Pemerintah Kota Bekasi yang melaksanakan urusan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil menjadi bagian dari pelaksana pelayanan dasar kepada masyarakat. Untuk itu, penyusunan Rencana Kerja tahun 2025 dimulai dari proses evaluasi capaian kinerja tahun 2023 dan mengacu kepada rancangan awal RKPD 2024 Pemerintah Kota Bekasi. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi Tahun 2025 berisi Program dan Kegiatan Prioritas untuk mewujudkan capaian kinerja Rencana strategik Tahun 2024 - 2026.

Penyusunan rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi Tahun 2025 dilakukan untuk menetapkan perencanaan pembangunan tahunan yang berisi program, kegiatan dan penganggaran sebagai penjabaran dari upaya pencapaian target yang telah ditetapkan dalam rencana strategi. Selain pencapaian target yang telah di tetapkan dalam RENSTRA juga terdapat indikator capaian cakupan target pelayanan adminduk yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Provinsi Jawa Barat antara lain:

a. Cakupan kepemilikan Kartu Keluarga;

b. Cakupan penerbitan KIA;

c. Cakupan penerbitan Akta Kelahiran;

d. Cakupan Penerbitan KTP-el;

e. Cakupan Kepemilikan Akta Perkawinan;

f. Cakupan Penerbitan Akta Kematian.

Dalam upaya peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan kepada masyarakat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan melaksanakan pelayanan berbasis Teknologi Informasi untuk memenuhi kemudahan layanan dengan memotong alur birokrasi melalui Rencana Pelaksanaan Layanan Adminduk di Seluruh Kelurahan di Kota Bekasi serta memberikan layanan pemanfaatan data base kependudukan kepada lembaga pemerintah dan non-pemerintah. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut perlu ditunjang melalui peningkatan kapasitas Aparatur, ketersediaan anggaran, penataan sarana dan prasarana serta evaluasi terhadap produk hukum daerah dan *updating* SOP Administrasi Kependudukan.

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Pemerintah Kotamadya daerah Tingkat II Bekasi;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi;
16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kota Bekasi;
17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi;
18. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 03 Seri E).
19. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi Tahun 2025 merupakan Rencana Pembangunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi dalam kurun waktu 1 (Satu) tahun, memuat usulan program dan kegiatan yang tercermin dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan bersifat indikatif. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi Tahun 2025, ditetapkan dengan maksud :

1. Memuat program/kegiatan prioritas pembangunan daerah yang berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta sebagai fasilitasi dari program/kegiatan Pemerintah Daerah sesuai tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi.
2. Memuat rencana kinerja tahunan, kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD.

1.3.2 Tujuan

1. Memberikan acuan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2025;
2. Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada RKPD untuk menjawab tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja serta pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi;

3. Memelihara kesinambungan proses dan hasil-hasil kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

1. Bab 1 (satu) Pendahuluan berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.
2. Bab 2 (dua) menggambarkan Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu yang berisi Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD, Analisis Kinerja Pelayanan PD, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD, Review terhadap Rancangan Awal PD dan Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
3. Bab 3 (tiga) menggambarkan Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan. Bab ini menggambarkan Telahaan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja PD Dan Program dan Kegiatan, Isu-isu Strategis.
4. Bab 4 (empat) berisi Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah yaitu berisi usulan program dan Kegiatan
5. Bab 5 (lima) berisi penutup yaitu Pencatatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BEKASI TAHUN LALU

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi tahun 2023 (n-2) ditunjukkan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah, serta hambatan permasalahan yang dihadapi. Jenis program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja PD terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Peraturan Perangkat Daerah, merupakan Pedoman bagi Pemerintah Daerah baik provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam rangka penataan Kelembagaan Perangkat Daerah untuk pembentukan organisasi perangkat daerah berupa Dinas, Badan, Sekretariat serta Kecamatan tentang pembagian urusan Pemerintah antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Evaluasi pelaksanaan renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra OPD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Kajian (review) terhadap evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun

sebelumnya. Sedangkan untuk Evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra tahun 2015 belum dapat dilakukan karena sebagai Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi baru terbentuk pada tahun 2018 melalui Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi. Serta sebagai unit kerja menjalankan tugas, fungsi, kewenangan serta tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan melalui Peraturan Walikota Bekasi Nomor 77 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi. Kegiatan evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Pelaksanaan program dan kegiatan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, berdasarkan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun 2022 dilaksanakan sebanyak 5 program dan 13 kegiatan dan 29 Sub Kegiatan. Hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja program dan kegiatan Tahun 2023 dan prakiraan tingkat capaian kinerja Renstra s/d realisasi Tahun 2023 sebagaimana yang tertera pada Tabel II.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2023.

Tabel
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2023
Kota Bekasi

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	1	2	3	4	5	6	7 = (6/5)	8	9 = (4+6+8)	10=(9/3)
Program Pencatatan Sipil										
1	Pelayanan Pencatatan Sipil									
	- Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Sarpras	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	100%	6 Jenis	6 Jenis	100%
	- Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Sarpras	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	2 Unit	2 Unit	100%
Program Pendaftaran Penduduk										
1	Pelayanan Pendaftaran Penduduk									
	- Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Jemput Bola	2 lokasi	2 lokasi	2 lokasi	2 lokasi	100%	2 lokasi	2 lokasi	100%
	- Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	2 Laporan	100%
2	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk									
	- Fasiltasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Sarpras	6 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	100%	6 Unit	6 Unit	100%

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	1	2	3	4	5	6	7 = (6/5)	8	9 = (4+6+8)	10=(9/3)
	- Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Sosialisasi	12 Lokasi	12 Lokasi	12 Lokasi	12 Lokasi	100%	12 Lokasi	12 Lokasi	100%
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan										
1	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan									
	- Kerjasama Pemanfaatan Data	Jumlah Pemanfaatan Data	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	100%	3 Paket	3 Paket	100%
2	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan									
	- Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Sarpras	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket	2 Paket	100%
	- Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Sosialisasi	12 Kecamatan	12 Kecamatan	12 Kecamatan	12 Kecamatan	100%	12 Kecamatan	12 Kecamatan	100%
Program Pengelolaan Profil Kependudukan										
1	Penyusunan Profil Kependudukan									
	- Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen / Buku	5 Buku	5 Buku	5 Buku	5 Buku	100%	5 Buku	5 Buku	100%
	- Penyediaan Data Kependudukan	Jumlah Sosialisasi	12 Kecamatan	12 Kecamatan	12 Kecamatan	12 Kecamatan	100%	12	12 Kecamatan	100%

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	1	2	3	4	5	6	7 = (6/5)	8	9 = (4+6+8)	10=(9/3)
	Kabupaten/Kota	Pemanfaatan Data Kependudukan						Kecamatan		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota										
1	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	100%	7 Dokumen	7 Dokumen	100%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji Asn	67 Orang	67 Orang	67 Orang	67 Orang	100%	67 Orang	67 Orang	100%
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan	2 Jenis Laporan	2 Jenis Laporan	2 Jenis Laporan	2 Jenis Laporan	100%	2 Jenis Laporan	2 Jenis Laporan	100%
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
	- Pendidikan dan Pelatihan pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Peserta Diklat	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	100%	10 Orang	10 Orang	100%
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah									
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100^%	1 Paket	1 Paket	100%

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	1	2	3	4	5	6	7 = (6/5)	8	9 = (4+6+8)	10=(9/3)
	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Logistik	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket	2 Paket	100%
	- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan Penggandaan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	100%	3 Paket	3 Paket	100%
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Bahan Bacaan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket	2 Paket	100%
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Frekuansi Rapat	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rek Listrik dan Internet	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pelayanan Umum Kantor	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	100%	3 Paket	3 Paket	100%
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan	6 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	100%	6 Unit	6 Unit	100%
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	100%	10 Unit	10 Unit	100%
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung	Jumlah Gedung yang	1 Gedung	1 Gedung	1 Gedung	1 Gedung	100%	1 Gedung	1 Gedung	100%

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	1	2	3	4	5	6	7 = (6/5)	8	9 = (4+6+8)	10=(9/3)
	kantor dan Bangunan Lainnya	terpelihara								
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket	2 Paket	100%

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kota Bekasi

RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
NO	PROGRAM / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	PROGRAM / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota**	**Disdukcapil**			**24.096.051.440**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota**	**Disdukcapil**			**24.096.051.440**	
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Disdukcapil	Jumlah Laporan Dokumen Perencanaan	5 Laporan	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Disdukcapil	Jumlah Laporan Dokumen Perencanaan	5 Laporan	3.000.000	
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Disdukcapil	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72 Orang /bulan	14.523.518.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Disdukcapil	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72 Orang /bulan	14.523.518.000	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Disdukcapil	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Disdukcapil	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	3.000.000	

RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
NO	PROGRAM / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	PROGRAM / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Disdukcapil	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	20.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Disdukcapil	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	20.000.000	
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Disdukcapil	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Disdukcapil	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.000.000	
6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Disdukcapil	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	266.980.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Disdukcapil	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	266.980.000	
7	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Disdukcapil	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	41.040.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Disdukcapil	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	41.040.000	
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Disdukcapil	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1850 Dokumen	25.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Disdukcapil	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1850 Dokumen	25.000.000	

RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
NO	PROGRAM / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	PROGRAM / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Disdukcapil	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	100.500.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Disdukcapil	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	100.500.000	
10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Disdukcapil	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	550.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Disdukcapil	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	550.000.000	
11	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Disdukcapil	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	8.149.621.440	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Disdukcapil	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	8.149.621.440	
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Disdukcapil	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	128.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Disdukcapil	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	128.000.000	

RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
NO	PROGRAM / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	PROGRAM / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Disdukcapil	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	120.392.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Disdukcapil	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	120.392.000	
14	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Disdukcapil	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	33 Unit	50.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Disdukcapil	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	33 Unit	50.000.000	
15	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Disdukcapil	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Disdukcapil	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000	
	Program Pendaftaran Penduduk	**Disdukcapil**			**3.230.000.000**	**Program Pendaftaran Penduduk**	**Disdukcapil**			**3.230.000.000**	
1	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Disdukcapil	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	2 Dokumen	50.000.000	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Disdukcapil	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	2 Dokumen	50.000.000	

RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
NO	PROGRAM / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	PROGRAM / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Disdukcapil	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	1 Dokumen	100.000.000	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Disdukcapil	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	1 Dokumen	100.000.000	
3	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Disdukcapil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	2 Laporan	3.000.000.000	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Disdukcapil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	2 Laporan	3.000.000.000	
4	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Disdukcapil	Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	80.000.000	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Disdukcapil	Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	80.000.000	
B	**Program Pencatatan Sipil**	**Disdukcapil**			**400.000.000**	**Program Pencatatan Sipil**	**Disdukcapil**			**400.000.000**	
1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Disdukcapil	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	100.000 Dokumen	300.000.000	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Disdukcapil	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	100.000 Dokumen	300.000.000	

RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
NO	PROGRAM / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	PROGRAM / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Disdukcapil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang ditingkatkan	3 Layanan	100.000.000	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Disdukcapil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang ditingkatkan	3 Layanan	100.000.000	
C	**Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Disdukcapil**			**3.682.176.608**	**Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Disdukcapil**			**3.682.176.608**	
1	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Disdukcapil	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	6 Dokumen	75.000.000	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Disdukcapil	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	6 Dokumen	75.000.000	
2	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Disdukcapil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	5 Laporan	3.442.176.608	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Disdukcapil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	5 Laporan	3.442.176.608	
3	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Disdukcapil	Jumlah Sosialisasi	1 Paket	165.000.000	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Disdukcapil	Jumlah Sosialisasi	1 Paket	165.000.000	
D	**Program Pengelolaan Profil Kependudukan**	**Disdukcapil**			**185.000.000**	**Program Pengelolaan Profil Kependudukan**	**Disdukcapil**			**185.000.000**	

RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
NO	PROGRAM / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	PROGRAM / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Disdukcapil	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang lain	3 dokumen	50.000.000	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Disdukcapil	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang lain	3 dokumen	50.000.000	
	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Disdukcapil	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	3 dokumen	135.000.000	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Disdukcapil	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	3 dokumen	135.000.000	
					31.593.228.048					**31.593.228.048**	

B. Program/Kegiatan yang memenuhi, tidak memenuhi dan melebihi target kinerja hasil/keluaran

a. Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah kegiatan :

1. Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
2. Pelayanan Dokumen Kependudukan
3. Koordinasi dan Konsultasi terkait pelaksanaan kebijakan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

b. Realisasi Program/Kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah kegiatan :

1. Optimalisasi pelayanan administrasi kependudukan berbasis SIAK
2. Pengadaan Blanko KK, KIA dan Pencetakan Kartu Sehat
3. Pengadaan Ribbon/Tinta dan Film
4. Pengadaan Map Administrasi Kependudukan
5. Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggaraan Adminduk
6. Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Identitas Anak

c. Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah kegiatan : NIHIL

C. Faktor-faktor, Implikasi yang timbul dan Kebijakan/Tindakan yang diambil

a. Faktor-faktor penyebab tidak terpenuhinya pada realisasi program/kegiatan

1. Adanya pandemi Covid 19
2. Adanya efisiensi anggaran

b. Implikasi yang timbul terhadap target kinerja hasil/keluaran

1. Perencanaan yang sudah disusun tidak berjalan sesuai yang diharapkan
2. Kegiatan tidak dapat dilaksanakan

c. Kebijakan/Tindakan yang harus diambil

1. Penyusunan perencanaan yang lebih matang dan terukur

2. Kegiatan yang belum terealisasi akan ditindaklanjuti pada tahun berilkutnya

REALISASI FISIK DAN ANGGARAN TAHUN 2023
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BEKASI

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI		REALISASI FISIK
			KEUANGAN	%	
I	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**24.455.170.606**	**20.033.921.198**	**81,92**	**86,36**
1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**7.000.000**	**4.895.000**	**69,93**	**100,00**
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.000.000	4.895.000	69,93	100,00
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**14.530.518.000**	**12.208.181.929**	**84,02**	**90,00**
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.523.518.000	12.203.328.129	84,02	90,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.000.000	4.853.800	69,34	85,66
3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0	0	0,00	0,00
4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**724.520.000**	**586.215.829**	**80,91**	**93,10**
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000	14.804.000	98,69	100,00
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	391.980.000	288.231.300	73,53	100,00
3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	91.040.000	67.496.700	74,14	100,00
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25.000.000	25.000.000	100,00	100,00

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI		REALISASI FISIK
			KEUANGAN	%	
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	151.500.000	144.489.829	95,37	100,00
6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	50.000.000	46.194.000	92,39	0,00
5	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**8.612.740.606**	**6.846.661.740**	**79,49**	**79,31**
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	520.000.000	333.229.747	64,08	92,51
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8.092.740.606	6.513.431.993	80,48	78,46
6	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**580.392.000**	**387.966.700**	**66,85**	**91,20**
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	148.000.000	131.391.500	88,78	89,59
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	155.392.000	108.211.200	69,64	82,00
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	77.000.000	49.138.000	63,82	90,00
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000	99.226.000	49,61	100,00
II	**Program Pendaftaran Penduduk**	**4.280.000.000**	**3.075.899.000**	**71,87**	**100,00**
1	**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**600.000.000**	**159.589.500**	**26,60**	**100,00**
1	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	500.000.000	76.706.000	15,34	100,00
2	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	100.000.000	82.883.500	82,88	100,00

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI		REALISASI FISIK
			KEUANGAN	%	
2	**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	**3.680.000.000**	**2.916.309.500**	**79,25**	**100,00**
1	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	3.600.000.000	2.839.013.000	78,86	100,00
2	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	80.000.000	77.296.500	96,62	100,00
III	**Program Pencatatan Sipil**	**400.000.000**	**346.687.865**	**86,67**	**100,00**
1	**Pelayanan Pencatatan Sipil**	**400.000.000**	**346.687.865**	**86,67**	**100,00**
1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	300.000.000	255.039.000	85,01	100,00
2	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	100.000.000	91.648.865	91,65	100,00
IV	**Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**4.077.339.608**	**3.079.953.800**	**75,54**	**97,20**
1	**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	**75.000.000**	**70.270.000**	**93,69**	**80,00**
1	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	75.000.000	70.270.000	93,69	80,00
2	**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**4.002.339.608**	**3.009.683.800**	**75,20**	**97,53**
1	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	3.837.339.608	3.003.384.100	78,27	100,00
2	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	165.000.000	6.299.700	3,82	40,00
V	**Program Pengelolaan Profil Kependudukan**	**185.000.000**	**50.394.400**	**27,24**	**59,86**
1	**Penyusunan Profil Kependudukan**	**185.000.000**	**50.394.400**	**27,24**	**59,86**
1	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	50.000.000	46.044.500	92,09	100,00
2	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	135.000.000	4.349.900	3,22	45,00

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI		REALISASI FISIK
			KEUANGAN	%	
TOTAL		33.397.510.214	26.586.856.263	79,61	89,45

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai target indikator sasaran dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan serta untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan. Untuk menganalisis kinerja pelayanan atau tingkat capaian kinerja sasaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, digunakan beberapa indikator antara lain Cakupan Database Penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan, Cakupan Penerbitan KK, Cakupan Penerbitan KTP, Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran, Cakupan Penerbitan Akta Kematian dan Cakupan Penerbitan Akta Perkawinan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu penting adalah merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya yang signifikan bagi PD. Perumusan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi PD, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan dan hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan PD. Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, guna pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana yang dituangkan pada RPJMD, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi senantiasa dipengaruhi oleh isu-isu penting yang bersifat strategis, baik berupa kondisi, keadaan, atau peristiwa yang dampaknya dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Berdasarkan kajian hasil evaluasi penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, khususnya pada kinerja pelayanan Administrasi Kependudukan selama ini, dapat diidentifikasi isu-isu penting sebagai berikut :

1. Dalam rangka integrasi pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sehingga tercapai akurasi database, regulasi Pemerintah di bidang penyelenggaraan adminduk (UU Nomor 23 Th 2006, PP Nomor 37 Th 2007 dan Perpres Nomor 25 Th 2008 serta PP Nomor 41 Th 2007) harus dilaksanakan secara keseluruhan, berkesinambungan dan terus - menerus, antara lain melalui:

   a. Penyediaan aplikasi untuk setiap jenis pelayanan (pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengolahan/pemanfaatan data dan informasi) yang terintegrasi ke dalam satu sistem, yaitu SIAK;
   b. Pemutakhiran database (pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengolahan/pemanfaatan data dan informasi) melalui sistem/online.
2. Mekanisme/pola penyimpanan arsip pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang dapat diakses melalui teknologi;
3. Pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang mudah, cepat, transparan dan dekat dengan masyarakat;
4. Pengawasan dan pengendalian penegakan peraturan administrasi kependudukan dan pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
5. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait (penanggulangan kemiskinan, dll);
6. Kajian, penelitian dan pengembangan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
7. Untuk menunjang kelengkapan tertib administrasi pelaksanaan pelayanan masyarakat serta tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, harus berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM);
8. Terbatasanya kewenangan yang tercantum pada Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah di mana kewenangan Dinas Kependuudkan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi hanya pada penyusunan Profil perkembangan kependudukan daerah;
9. Akurasi data kependudukan di Kota Bekasi yang masih harus ditingkatkan. masih ada jumlah Data Ganda dan Data Anomali yang dirilis oleh Ditjen Dukcapil.

Berdasarkan data empiris yang terjadi dan analisis lingkungan organisasi dapat diidentifikasi permasalahan yang dihadapi. Pertama, lingkungan internal merupakan faktor yang dapat dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi meliputi kekuatan dan kelemahan. Kedua, lingkungan eksternal merupakan faktor yang tidak dapat dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi peluang dan tantangan.

a. Faktor Kekuatan Organisasi:

1. Landasan hukum kelembagaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi :

   Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dibentuk berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, sehingga menegaskan kewenangan Pembantuan Bidang Administrasi Kependudukan;
2. Landasan hukum penyelenggaraan Administrasi Kependudukan :

   Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dibentuk berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi;
3. Adanya komitmen Kepala Dinas dan seluruh jajaran untuk memberikan kontribusi optimal terhadap pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Bekasi;
4. Implementasi Standar Manajemen Mutu;
5. Adanya motivasi belajar aparatur yang tinggi.

b. Faktor Kelemahan Organisasi :

1. Sumber Daya Manusia yang tersedia belum memadai sesuai kebutuhan secara kuantitas dan kualitas;
2. Ketersediaan sarana dan prasarana yang belum memadai. Ketersediaan sarana dan prasarana merupakan salah satu prasyarat dalam pencapaian tujuan, sehingga ketersediaan dan ketercukupannya akan mempengaruhi proses pencapaian tujuan.

c. Faktor Peluang Organisasi :

1. Adanya penerapan nyata Undang- Undang nomor 23 tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 serta Permendagri Nomor

100 Tahun 2016; Kebijakan pemerintah tentang otonomi daerah, kelembagaan daerah serta pedoman nomenklatur instansi di daerah memberikan peluang kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi untuk dapat melakukan berbagai upaya strategis dalam rangka mewujudkan Profesional dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Berbasis Teknologi Informasi

2. Adanya media teknologi dan informasi untuk mensosialisasikan program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Perkembangan teknologi informasi memberikan kemudahan kepada setiap stakeholder dalam melakukan pelayanan 35sistem. Hal tersebut juga berdampak pada pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Perkembangan teknologi dan sistem informasi mempermudah pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan juga memudahkan stakeholder untuk mengakses pelayanan tersebut.

d. Faktor Tantangan Organisasi :

1. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima; Perkembangan kehidupan masyarakat saat ini banyak memberikan penekanan perubahan pelayanan publik. Kemajuan kehidupan masyarakat secara tidak langsung berimplikasi terhadap permintaan kualitas pelayanan yang diinginkan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan pubik menjadi sebuah hal yang harus dilakukan;
2. Adanya pola pikir masyarakat bahwa mengurus Administrasi Kependudukan itu sulit, mahal dan berbelit-belit.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan rencana program prioritas dan pagu indikatif yang berdasarkan Rancangan Awal RKPD. Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja

program/kegiatan, tolak ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN / TUJUAN	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun Ke

indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk SKPD yang bersangkutan. Dari análisis kebutuhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi. Program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 semua telah dirancang memenuhi indikator sasaran yang terdapat pada rancangan awal RKPD.

Penelaahan Usulan Progran dan Kegiatan Masyarakat

Penalaahan usulan program pada sub bab ini menguraikan kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang merupakan kegiatan jaring aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun 2025, yang sesuai dengan tugas dan fungsi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi.

Kajian usulan program dan kegiatan merupakan usulan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, LSM, dan lembaga dan asosiasi-asosiasi penyiaran. Informasi tersebut diperoleh berdasarkan masukan dari asosiasi-asosiasi penyiaran dan aspirasi masyarakat dalam Forum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dilaksanakan setiap tahunnya. Dari hasil musrenbang yang dilaksanakan, tidak ada usulan program dan kegiatan yang diusulkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi. Namun demikian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi telah mempunyai Program dan Kegiatan rutin dimana salah satu sasaran kegiatannya adalah Kecamatan se- Kota Bekasi. Adapun program dan kegiatan dimaksud adalah Program Pendaftaran Penduduk, Program Pencatatan Sipil dan Program Data Kependudukan.

Tujuan dan Sasaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

				2025
1	Meningkattkan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui pelayanan yang berkualitas		Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	81.61%
		1 Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	81.61%
		2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	1 Indeks Kepuasan Masyarakat	85.15%
			2 Nilai AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	73.12%

Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan tahun 2025

Kota Bekasi

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

a. Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.Untuk menjamin sinergitas program pembangunan nasional dan daerah, penyusunan RKPD Tahun 2023 didasari pada arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam kebijakan pembangunan sesuai urusan pemerintahan daerah, adapun arah kebijakan pembangunan untuk urusan kependudukan dan pencatatan sipil adalah sebagai berikut:

1. Prioritas Nasional : Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar, perlunya dukungan kebijakan daerah.

   Arah Kebijakan :

   a. Perwujudan data dan dokumen kependudukan sebagai dasar dalam pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
   b. Mewujudkan integritas sistem administrasi kependudukan dengan berbagai stakeholder untuk meningkatkan cakupan akte lahir, akte mati dan akte cerai.
   c. Terwujudnya pelayanan publik yang efektif, efisien dan hasil tepat guna

2. Prioritas Nasional 2 : Kabupaten/Kota Inovasi Pelayanan Kepada Masyarakat Peningkatan Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota yang membahagiakan dengan Arah Kebijakan yaitu Meningkatkan Pelayanan yang membahagiakan melalui Inovasi.
3. Prioritas Nasional 3 : Peningkatan pemanfaatan NIK, Database Kependudukan dan KTP-el yang optimal dengan Arah Kebijakan yaitu Terkoneksinya Database Kependudukan dengan OPD terkait.

4. Prioritas Nasional 4 : Penanganan Stunting Pemberian Dokumen Kependudukan bagi anak usia 0 s.d 24 Bulan dengan arah kebijakan yaitu Meningkatnya kepemilikan Akte Kelahiran Anak Usia 0 s.d 24 Bulan.
5. Prioritas Nasional 5 : Fasilitasi pemberian NIK bagi setiap penduduk dengan arah kebijakan yaitu Meningkatnya Kualitas Database Kependudukan

b. Dalam melaksanakan pembangunan nasional ada hal-hal yang harus diperhatikan antara lain sebagai berikut:
   1. Penyediaan data kependudukan secara tersentral (online).
   2. Pemerintah daerah Provinsi dan Kab/Kota harus menyelenggarakan kegiatan yang mendukung suksesnya gerakan indonesia adminduk (GISA).
   3. Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota menyelenggarakan kegiatan:
      a. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang adminduk.
      b. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan adminduk.
      c. Peningkatan kualitas pelayanan adminduk melalui inovasi.
   4. Fasilitasi dan koordinasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi dan Kab/Kota dengan OPD lain untuk pemanfaatan database kependudukan.
   5. Mendorong daerah untuk optimalisasi penerapkan pelayanan berbasis digital.
   6. Peningkatan kualitas pelayanan dan penerbitan KTP-el melalui percepatan pelayanan sehari selesai.
   7. Jemput Bola di berbagai kantong pemukiman penduduk yang masih banyak belum melakukan perekaman termasuk membuka pelayanan perekaman KTP-el di berbagai event tingkat nasional maupun regional.
   8. Sosialisasi Pemanfaatan Data Kependudukan (MoU dan PKS).
   9. Pelaksanaan pelayanan malam sabtu, minggu (Car Free Day) dan pada event-event tertentu
   10. Konfigurasi jaringan dan database Kependudukan dalam rangka pemanfaatan data tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
   11. Dinas Dukcapil Provinsi dan Kab/Kota memberikan elemen data kepada Lembaga Pengguna dengan cara melihat pada relevansi

kebutuhan pemanfaatan data yang akan di akses oleh Lembaga Pengguna (tidak semua elemen data dapat diberikan). Jumlah kebutuhan elemen data harus dimasukkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

12. Melakukan Kerjasama dengan OPD terkait untuk meningkatkan cakupan Akta Kelahiran.
13. Peningkatan kualitas pelayanan dan penerbitan NIK bagi penduduk.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Perumusan Tujuan dan Sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD. Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi PD, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan. Tujuan PD berupa pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Visi, melaksanakan Misi, memecahkan permasalahan dan menangani Isu-Isu Strategis Daerah yang dihadapi. Tujuan Organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi Organisasi, yang mengandung makna:

a. Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun terakhir Rencana Strategis (Renstra);
b. Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi;
c. Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu rencana stategis.

Berdasarkan arahan makna penetapan Tujuan Organisasi dan uraian tersebut di atas, maka dalam kedudukannya sebagai Perangkat Daerah (PD), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi menetapkan Tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui pelayanan yang berkualitas.

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu Tujuan, yang diformulasikan secara spesifik, terukur, relevan/rasional dan dapat dicapai atau dilaksanakan. Sasaran dapat berupa hasil dari suatu program atau keluaran dari suatu kegiatan. Sasaran yang ingin dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, adalah sebagai berikut :

1. Meningkatknya Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi memiliki dukungan Pegawai Aparatur Sipil Negara sejumlah 66 pegawai dan Tenaga Kontrak Kerja sejumlah 137 Pegawai.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan OPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan, diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan

yang dihadapi, menjawab tantangan pembangunan, serta memaksimalkan peluang yang ada.

Rencana pelaksanaan program-program yang akan diwujudkan pada tahun 2025 sebanyak 5 Program, 17 kegiatan dan 41 Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
2. Program Pendaftaran Penduduk;
3. Program Pencatatan Sipil;
4. Program Pengelolaan Profil Kependudukan;
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 sebanyak 17 kegiatan dan 41 Sub Kegiatan sebagai berikut :

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	NILAI PAGU
	URUSAN	**8.352.725.184**
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	**3.363.717.184**
1	**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**3.009.520.184**
	a. Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2.753.360.184
	b. Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	156.160.000
	c. Penyajian Data Kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	100.000.000
2	**Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**400.000.000**
	a. Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	222.667.000
3	**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	**150.000.000**
	a. Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	131.630.000
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	**3.439.625.000**
4	**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**213.987.000**
	a. Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	109.658.000
	b. Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan	104.329.000

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	NILAI PAGU
	Administrasi Kependudukan	
5	**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	**3.225.638.000**
	a. Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	3.000.000.000
	b. Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	225.638.000
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	**109.440.000**
6	**Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain**	**109.440.000**
	a. Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	109.440.000
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	**1.439.943.000**
7	**Pelayanan Pencatatan Sipil**	**1.140.330.000**
	a. Peningkatan dalam pelayanan Pencatatan Sipil	991.580.000
	b. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Pelaporan Peristiwa Penting	148.750.000
8	**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**248.223.000**
	a. Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	200.000.000
	b. Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil	48.223.000
9	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**51.390..000**
	a. Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	51.390.000
	PENUNJANG URUSAN	**28.922.398.560**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**30.064.635.390**
1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**54.592.000**
	a. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.000.000
	b. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	25.000.000
	c. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.592.000
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**17.963.457.000**
	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.938.457.000
	b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	25.000.000
3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**726.333.000**
	a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan	159.375.000

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	NILAI PAGU
	Fungsi	
	b. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	510.000.000
	c. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	56.958.000
4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.238.537.950**
	a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000
	b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	676.478.000
	c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	70.000.000
	d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25.000.000
	e. Fasilitas Kunjungan Tamu	30.000.000
	f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	190.809.950
	g. Penataanusahaan Arsip Dinamis pada SKPD	231.250.000
5	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**7.897.687.440**
	a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	550.000.000
	b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	734.687.440
6	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.439.268.000**
	a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	223.268.000
	b. Pengadaan Mebel	448.000.000
	c. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	768.000.000
7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**605.890.000**
	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	205.430.000
	b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	150.460.000
	c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000
	d. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000
8	**Pemetaan Organisasi**	**138.870.000**
	a. Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	68.888.000
	b. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	69.982.000
JUMLAH		**38.417.360.574**

- **Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.**

1. **Pencapaian visi dan misi kepala daerah**

   Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi telah melaksanakan Visi dan Misi 1 Wali Kota Bekasi yaitu Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik meliputi melaksanakan pelayanan pada Mall Pelayanan Publik yang tersedia pada 3 titik layanan, meningkatan layanan penerbitan akte kelahiran dan layanan administrasi kependudukan lainnya dan mengembangan layanan publik berbasis IT.

2. **Pencapaian SDGs**

   Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melaksanakan program/kegiatan berkelanjutan (SDGs) antara lain adalah Pemutakhiran Data Kependudukan, Menjalin kerjasama antara Dinas terkait/instansi vertikal lainnya dalam hal pemanfaatan data kependudukan yang berbasis NIK.

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BEKASI
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	5	6	7
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			**38.417.360.574**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**38.417.360.574**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**			**38.417.360.574**	
1,	**2.12.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran***	**100%**	**30.064.635.390**	
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan*	100%	54.000.000	
	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	6 Dokumen	4.592.000	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu
	2.12.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*	2 Dokumen	25.000.000	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu

	2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	7 Laporan	25.000.000	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran*	100%	17.963.458.000	
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	1820 Orang/bulan	17.938.457.000	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu
	2.12.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	5 Laporan	25.000.000	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu
	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur*	100%	726.333.000	
	2.12.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*	2 Paket	510.000.000	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu
	2.12.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	8 Orang	159.375.000	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu
	2.12.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	210 Orang	56.958.000	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran*	100%	1.238.537.957	
	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	15.000.000	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu
	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	12 Paket	676.478.000	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu

	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	12 Paket	70.000.000	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu
	2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	2 Dokumen	25.000.0000	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu
	2.12.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	10 Laporan	30.000.000	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	12 Laporan	300.000.000	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu
	2.12.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD*	1000000 Dokumen	231.250.000	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Optimalisasi Peningkatan Sarana da Prasarana Aparatur*	100%	1.439.268.000	
	2.12.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*	12 Unit	768.000.000	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu
	2.12.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	2 Unit	448.000.000	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu
	2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	3 Unit	223.268.000	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan,*	100%	7.897.687.440	
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	550.000.000	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu

	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	7.347.687.440	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa yang disediakan*	100%	605.890.000	
	2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	6 Unit	205.430.000	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu
	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	7 Unit	150.460.000	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu
	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	7 Unit	50.000.000	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu
	2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	200.000.000	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu
	2.12.01.2.13	Penataan Organisasi	*Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan*	100%	138.870.000	
	2.12.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana*	1 Laporan	68.888.000	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu
	2.12.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	*Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi*	2 Dokumen	69.982.000	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu
2,	**2.12.02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	***Cakupan Kepemilikan KTP el*** ***Cakupan Kepemilikan KK***	**94,82 %** **97,95 %**	**3.439.625.000**	
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	*Cakupan Kepemilikan KTP-el Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan*	**94,82 %** **100 %**	213.987.000	

	2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	*Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan*	1 Dokumen	104.329.000	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu
	2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	*Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk*	2 Dokumen	109.658.000	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu
	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Terselenggaranya Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	100%	3.225.638.000	
	2.12.02.2.03.0003	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk*	1 Laporan	3.000.000.000	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu
	2.12.02.2.03.0005	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	*Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk*	1 Laporan	225.638.000	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu
3,	**2.12.03**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	***Cakupan Kepemilikan Akta PerkawinanCakupan Kepemilikan Akta KematianCakupan Kepemilikan Akta kelahiran***	**60.63 %64.32 %67.62 %**	**1.439.943.000**	
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	*Jumlah Dokumen Hasil pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting* *Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang ditingkatkan*	120000 Dokumen 3 Layanan	1.140.330.000	
	2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	*Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting*	12 Dokumen	148.750.000	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu
	2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	*Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan*	3 Layanan	991.580.000	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	*Jumlah Laporan Hasil Pencatatan Sipil Jumlah Pemangku* *Kepentingan dan Masyarakat yang menerima komunikasi dan informasi dan edukasi terkait pencatatan sipil*	1 Laporan 660 Orang	248.223.000	
	2.12.03.2.02.0008	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	*Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil*	1 Laporan	200.000.000	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu

	2.12.03.2.02.0010	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil	*Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Menerima Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Terkait Pencatatan Sipil*	660 Orang	48.223.000	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu
	2.12.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	*Terselenggaranya Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pencatatan sipil*	100%	51.390.000	
	2.12.03.2.03.0004	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	*Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil*	1 Laporan	51.390.000	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu
4,	**2.12.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	***Jumlah Dokumen Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan***	**1 Dokumen**	**3.363.717.184**	
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	*Jumlah Dokumen Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan*	1 Dokumen	131.530.000	
	2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	*Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan*	1 Dokumen	131.530.000	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	*persentase ketersediaan data catatan sipil dan administrasi kependudukan yang lengkap dan terbarui*	100% 100%	3.009.520.184	
	2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan*	1 Laporan	2.753.360.184	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu
	2.12.04.2.03.0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	*Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan*	1 Laporan	156.160.000	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu
	2.12.04.2.03.0008	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	*Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan*	1 Dokumen	100.000.000	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu
	2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	*Meningkatnya kemampuan Sumber Daya Manusia Disdukcapil yang berkualitas dalam pelayanan adminduk, mengolah, menganalisa, menyajikan data kependudukan dalam rangka pencapaian target*	100 %	222.667.000	

	2.12.04.2.04.0001	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan*	1 Laporan	222.667.000	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu
5,	**2.12.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	***Pemutahiran Profil Kependudukan***	**1 Dokumen**	**109.440.000**	
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	*Pemutahiran Profil Kependudukan*	100%	109.440.000	
	2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	*Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun*	1 Dokumen	109.440.000	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu
	J U M L A H				**38.417.360.574**	

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2025 sebagai acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan masyarakat termasuk dunia usaha yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif.

Bagi satuan kerja pelaksana program, RKPD Tahun 2025 yang ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakan publik baik dalam kerangka deregulasi maupun kerangka anggaran dalam APBD Tahun 2025 yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran.

Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program pembangunan yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2025 dan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025 benar-benar dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas. Disamping itu seluruh satker mulai membuat rencana aksi dalam upaya penggalian dan memobilisasi sumber-sumber pembiayaan pembangunan yang berasal dari masyarakat ataupun dunia usaha. Mobilisasi dana masyarakat dapat dilakukan dengan model BOT, leasing, konsensi dan lain sebagainya. Partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sudah direncanakan perlu didukung dengan kepastian hukum dan kemudahan pelayanan.

Pelaksanaan kegiatan RKPD Tahun 2025 harus dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar satuan kerja, satuan kerja dengan kabupaten/kota maupun satuan kerja dengan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjaringan aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip safe guarding yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi.

Penerapan prinsip safe guarding akan berhasil bila didukung oleh peran serta masyarakat luas dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang dituangkan dalam bentuk regulasi. Masyarakat luas juga dapat berperan serta untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan sehingga keterlibatan masyarakat merupakan faktor penting bagi terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, maka monitoring dan evaluasi harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan

dan dilaksanakan pada setiap tahapan, agar diperoleh hasil yang maksimal, serta sebagai umpan balik bagi perencanaan pembangunan tahap berikutnya.

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja tahun 2025 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada akhir tahun.

Rencana Kerja memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi, pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasimerupakan implementasi dari Renstra.Implementasi dari Renstra dimaskud diarahkan untuk peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kantor, Pengelolaan dan Pengembangan Database Kependudukan yang berbasis TI, Peningkatan Pelayanan Masyarakat dan Pemanfaatan Database Administrasi Kependudukan.

Hasil implementasi yang dilakukan oleh jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah memenuhi cakupan yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, diantaranya Cakupan Penerbitan KTP-el 98,15%, Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran 65,80%, Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga 89,67%, Cakupan Kepemilikan Akta Perkawinan 60,29%, Cakupan Penerbitan Akta Kematian 64,20%.

Dalam upaya memenuhi cakupan-cakupan dokumen kependudukan memang dibutuhkan anggaran yang tidak sedikit pada periode saat ini anggaran yang tersedia masih belum dapat memenuhi kebutuhan yang direncanakan, diharapkan pada periode selanjutnya masih dibutuhkan penambahan anggaran mengingat proses penyelenggaraan administrasi kependudukan kita arahkan kepada layanan berbasis TI.

Pelaksanaan dari penyelenggaraan cakupan-cakupan yang telah ditetapkan diselenggarakan dengan mengacu kepada Undang-undang 24 tahun 2014 Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232), Permendagri Nomor 69 Tahun 2102 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 6 Seri E) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 03 Seri E), Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 27 Seri E). Dari kaidah-kaidah hukum dimaksud penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kota Bekasi berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja tahunan sangat bergantung pada komitmen seluruh aparaturnya, konsistensi sangat diperlukan, capaian cakupan yang telan dilakukan sebagai bahan kajian lebih lanjut dalam merencanakan Rencana Kerja di periode selanjutnya.

Pelaksanaan rencana kerja saat ini diharapkan mampu mendorong untuk pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dituangkan dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) di periode selanjutnya.

Demikian rencana kerja ini disusun sebagai bahan kajian lebih lanjut.

Bekasi,

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA BEKASI

Dr. TAUFIQ R HIDAYAT, AP, M.Si
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19751001 199311 1 002